

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kepadatan penduduk merupakan suatu persoalan yang sangat penting karena hal tersebut sangat berdampak pada kemajuan suatu negara. Kepadatan di suatu negara akan memberikan banyak dampak negatif yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Salah satu dampak akibat kepadatan penduduk yaitu kemiskinan.

Menurut Soekanto (2010:320) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tertentu. Permasalahan kemiskinan sangat rumit sehingga suatu negara harus mempunyai cara untuk mengatasinya.

Kemiskinan muncul karena adanya ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai pada taraf yang layak. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga pendapatan yang diperoleh juga sangat rendah.

Pemicu terjadinya kemiskinan antara lain; rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, serta tidak adanya keinginan untuk mengembangkan diri. Persoalan inilah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengubah kondisi masyarakat miskin menjadi lebih baik. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan

bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Evi Rahmawati, 2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan tiap tahunnya, melalui beberapa program kebijakan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Sejahtera dan sebagainya. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari permasalahan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia, Pemerintah juga telah mengambil tindakan dalam menanggulangi permasalahan ini. Dilihat dari Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah ada sejak tahun 2007, dengan tujuan untuk membangun atau meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, sekaligus sebagai cara memutuskan rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH diutamakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin

melalui pemberdayaan kaum ibu, dan memajukan agar anaknya tetap bersekolah yang sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (Evi Rahmawati, 2017). PKH pertama kali diimplementasikan oleh sejumlah negara Amerika Latin, dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbia, Jamaica, dan Nikaragua yang dikenal dengan program *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini terkategori sukses dalam menurunkan angka kemiskinan karena program ini berupaya mengubah perilaku hidup RTM (Rumah Tangga Miskin) dengan cara memberi bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan. Program Keluarga Harapan ini diarahkan untuk menjadi Program yang menanggulangi kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial. PKH ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Tujuan diberlakukannya PKH diindonesia yaitu untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM (Rumah Tangga Miskin) yang kurang relatif mendukung peningkatan kesejahteraan dari masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus mendukung dalam upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goal* (MGDs). Ada (5) lima komponen MGDs yang secara tidak langsung dapat terbantu oleh PKH, yang mencakup: Pengurangan penduduk miskin, Pendidikan dasar, Kesetaraan gender, Pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan Penanggulangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus tujuan PKH, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan

gizi ibu hamil, nifas, balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.

PKH di Jawa Timur mulai diimplementasikan pada tahun 2007. Desa Dalisodo adalah salah satu desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang sudah menjalankan program PKH sejak tahun 2013. PKH di Desa Dalisodo dikelola oleh koordinator Kabupaten/Kota, Asisten Pendamping dan Pendamping PKH. Masing-masing pengelola mempunyai peran, tugas dan fungsi dalam menjamin keberhasilan PKH. Pendamping PKH memiliki peranan penting dalam pelaksanaan dan kesuksesan PKH, selain itu juga sebagai pihak kunci yang dapat menjembatani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pihak-pihak lain yang terlibat ditingkat kecamatan maupun program ditingkat kabupaten/kota. Pendamping mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi komitmennya.

Tahap pertama pengelolaan PKH di desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yaitu menetapkan calon peserta yang ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga, lalu melakukan pertemuan awal tentang sosialisasi program dengan calon Keluarga Penerima Manfaat PKH dan memvalidasi dengan cara mencocokkan data awal calon Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sesuai kriteria komponen, setelah itu penetapan Penerima Manfaat PKH, lalu tahap kedua penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara bertahap setiap tahun atau empat bulan sekali, penyalurannya berupa uang dilakukan secara non tunai, pengambilannya bisa melalui bank penyalur ke rekening an. Penerima Manfaat, melalui E-warong dengan diakses menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tahap ketiga adalah pendamping PKH

mengadakan pertemuan kelompok-kelompok desa dalam satu bulan sekali, lalu verifikasi komitmen untuk memastikan anggota KPM terdaftar dan hadir dalam mendapatkan Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, dan yang terakhir Fasilitas Kesejahteraan Sosial, lalu pendamping melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan sebagian atau keseluruhan data anggota KPM PKH. Tahap terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pendamping setiap satu bulan sekali dalam bentuk laporan kegiatan bulanan.

Namun dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih terdapat masalah-masalah dilapangan. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti (03 Oktober 2022) masalah yang terdapat di Desa Dalisodo yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui Tujuan PKH, penerima PKH yang masih sulit diberdayakan karena terlambatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelolah uang bantuan PKH, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam merubah dan meningkatkan kemampuan dan kondisi ekonomi. Masalah lain yang juga sering datang yaitu protes-protes yang dilayangkan kepada pendamping PKH yang bahwasannya ada sebagian masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi namun tidak mendapat bantuan tersebut, dan mereka merasa layak untuk menerima manfaat dari program tersebut.

Dilihat dari latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti ungkapkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pendidikan nonformal tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Dalisodo.

### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi masyarakat dapat mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu program dapat mengatasi kemiskinan.
- b) Bagi pemerintah dapat mengetahui bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesuksesan PKH dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.